



## MANAJEMEN KOMUNIKASI BENCANA BPBD NAGAN RAYA PADA SITUASI TERDAPAT POTENSI BENCANA

Friska Marina<sup>1</sup>, Putri Maulina<sup>2</sup>, Said Fadhlain<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Teuku Umar

Email: [marinafriska25@gmail.com](mailto:marinafriska25@gmail.com)

Email: [putrimaulina@utu.ac.id](mailto:putrimaulina@utu.ac.id)

Email: [saidfadhlain@utu.ac.id](mailto:saidfadhlain@utu.ac.id)

### Abstrak

Potensi bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya, khususnya Kecamatan Tripa Makmur memiliki kecenderungan intensitas kejadian tinggi dan berulang, dampak besar dan luas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran strategis dalam menanggulangi bencana khususnya bencana banjir yang masuk kedalam 5 bencana prioritas. Manajemen Komunikasi Bencana sangat dibutuhkan khususnya pada situasi terdapat potensi bencana, untuk mengurangi risiko bencana dan mempercepat proses penanganan ketika terdapat potensi bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen komunikasi bencana BPBD Kabupaten Nagan Raya pada situasi terdapat potensi bencana banjir. Penelitian ini dikaji menggunakan konsep manajemen komunikasi Puji Lestari (2006) dengan indikator Perencanaan (komunikasi berbagai arah), Pengorganisasian (kemitraan), Pengendalian (kepemimpinan motivasi), Evaluasi (koordinasi). Data dikumpulkan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penyajian analisa secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan manajemen komunikasi BPBD pada situasi terdapat potensi bencana belum optimal, disebabkan oleh beberapa faktor: 1). Pada tahap mitigasi bencana banjir, belum adanya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. 2). Masih minimnya sarana dan prasarana mitigasi bencana oleh terbatasnya anggaran. 3). Belum adanya sistem peringatan dini. 4). BPBD Kabupaten Nagan Raya belum memiliki akun media sosial dan juga *website* resmi.

**Kata Kunci:** *Manajemen, Komunikasi, BPBD, Pra-bencana, Banjir*

### Abstract

*The potential for flood disasters that occur in Nagan Raya District, especially Tripa Makmur District, has a tendency of high and recurrent intensity of events, large and wide impacts. The Regional Disaster Management Agency (BPBD) has a strategic role in overcoming disasters, especially flood disasters which are included in the 5 priority disasters. Disaster Communication Management is very much needed, especially in situations of potential disaster, to reduce disaster risk and speed up the process of handling when there is a potential disaster. This study aims to determine how the disaster communication management of the Nagan Raya BPBD in a situation of potential flood disaster. This research was studied using the communication management concept of Puji Lestari (2006) with indicators of Planning (multi-direction communication), Organizing (partnership), Control (motivational leadership), Evaluation (coordination). Data were collected using qualitative research methods with descriptive analysis presentation. The results showed that the communication management of BPBD in situations of potential disaster was not optimal, caused by several factors: 1). At the flood disaster mitigation stage, there has been no direct socialization to the community. 2). The lack of disaster mitigation facilities and infrastructure due to limited budget. 3). There is no early warning system. 4). BPBD Nagan Raya Regency does not yet have a social media account and also an official website.*

**Keywords:** *Management, Communication, BPBD, Pre-disaster, Flood*

## PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi bencana alam terbesar menduduki posisi ke-4 dalam skala nasional. Data dari BNPB menunjukkan jumlah bencana alam di Aceh mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2016 hingga tahun 2018.

Tabel 1.2.  
Data Bencana Provinsi Aceh 2016-2018

Tahun	Jenis Bencana					
	Banjir	Tanah Longsor	Karhutla	Angin Puting Beliung	Gempa Bumi	Gelombang pasang/Abrasi
2016	36	4	9	30	0	3
2017	53	2	6	27	2	1
2018	74	2	33	48	1	2

Kabupaten Nagan Raya berada di daerah pesisir barat selatan Provinsi Aceh. Kawasan ini berada di pantai barat pulau Sumatera yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia yang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah, serta daerah pantai. Secara geografis wilayah Nagan Raya memiliki kedudukan yang strategis dimana berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Daerah ini dialiri oleh lima sungai besar dan sepuluh anak sungai, serta memiliki lima daerah aliran sungai utama. Penggunaan lahan didominasi oleh hutan dan perkebunan dan pada beberapa wilayah terdapat lahan gambut. Sebagian besar wilayah ini berupa dataran rendah dan memiliki tutupan lahan terbuka seperti perkebunan dan pertanian lahan kering. Selain itu, wilayah ini juga berada pada zona sesar Sumatera dan terdapat segmen sesar Aceh *Seulimeum*. (Dokumen KRB Kabupaten Nagan Raya, 2019).

Bencana yang rentan terjadi di Kabupaten Nagan Raya ialah bencana banjir. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dalam kurun waktu 2008-2018 telah tercatat sebanyak 33 kejadian dengan potensi yang besar. Banjir di Kabupaten Nagan Raya terjadi karena faktor alami dan faktor manusia. Secara alami, banjir disebabkan oleh curah hujan tinggi yang mengakibatkan badan sungai tidak mampu menampung aliran air permukaan dari perbukitan dan berdampak air meluap ke perumahan warga. Selain itu, banjir juga terjadi karena kondisi topografi dataran banjir yang menyebabkan arus yang mengalir menjadi lebih deras. Potensi banjir di Kabupaten Nagan Raya terjadi merupakan limpasan dari sungai-sungai besar yang mengalir di wilayah Kabupaten Nagan Raya, terutama Krueng Tadu (Kecamatan Tadu Raya), *Krueng Lamie* (Kecamatan Darul Makmur), dan *Krueng Tripa* (Kecamatan Tripa Makmur) yang sebagian besar memiliki morfologi sungai kekelok atau *meandering*. (KRB Nagan Raya, 2019).

Secara faktor manusia, tata guna lahan yang tidak sesuai dari fungsi ekologis secara tidak langsung meningkatkan potensi bahaya banjir. Kawasan sempadan sungai yang berjarak paling sedikit 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai. Artinya, kawasan tersebut seharusnya menjadi kawasan lindung yang memiliki fungsi menjaga kelestarian lingkungan hidup. Namun dalam implementasinya, kawasan tersebut berubah menjadi kawasan budidaya dengan adanya aktifitas permukiman penduduk. Penyimpangan penggunaan lahan ini terjadi tidak saja tidak saja di wilayah hilir, namun juga di daerah hulu.

Hal ini yang perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar dengan melakukan upaya penanganan, salah satunya dengan penerapan pengerukan material yang menumpuk pada dasar sungai dan pemasangan batu gajah untuk menjaga kestabilan wilayah sempadan sungai. Selain itu, sosialisasi penting dilakukan terhadap penduduk yang berada di daerah bantaran sungai dan sekitarnya, terkait dengan kesiapsiagaan saat menghadapi banjir dan menumbuhkan budaya sadar bencana. Bencana banjir di Kabupaten Nagan Raya juga disebabkan oleh banjir kiriman dan banjir pasang khususnya pada daerah yang berada di garis pantai (KRB Nagan Raya, 2019). Kecamatan Tripa Makmur menjadi salah satu kecamatan yang sering dilanda banjir. Hampir setiap musim hujan daerah ini menjadi langganan banjir. Faktor penyebabnya yakni topografi rendah, luapan air sungai *Krueng* Tripa ketika curah hujan tinggi dan tidak di imbangi dengan *drainase*. Kondisi topografi dataran rendah juga menjadi salah satu penyebabnya. Banjir yang melanda Kecamatan Tripa Makmur juga merupakan banjir kiriman dari limpasan sungai *Krueng* Tadu.

Dalam penanggulangan bencana memiliki tiga fase pengelolaan bencana ketika pra-bencana, saat bencana dan pasca bencana. Penanggulangan bencana pada fase pra-bencana menjadi langkah awal dalam mengurangi kerentanan masyarakat menghadapi bencana. Dalam penanggulangan bencana di Indonesia, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan arahan langsung dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan di *Sentul City International*

*Convention Center* Bogor pada 4 Februari 2020. Arahan tersebut berisikan lima poin penting keterlibatan berbagai instansi dalam berperan serta menanggulangi bencana meliputi, pemerintah pusat, gubernur, walikota, bupati, akademisi, dunia usaha, media Massa, TNI, POLRI dan masyarakat ([bnpb.go.id](http://bnpb.go.id)). Pemerintah juga telah menetapkan beberapa peraturan/regulasi dalam menanggapi kebencanaan di Indonesia dalam penanggulangan bencana seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Dalam hal ini BPBD Kabupaten Nagan Raya memiliki peran strategis dalam menanggulangi bencana khususnya bencana banjir. Maka dalam proses penanggulangan bencana perlu adanya manajemen komunikasi bencana. Manajemen komunikasi bencana merupakan upaya yang komprehensif untuk mencegah dan mengurangi risiko bencana dengan mengelola proses produksi pesan-pesan atau informasi tentang bencana, penyebaran pesan dan penerimaan pesan dari tahap pra-bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana (Lestari, Prabowo, Wibawa, 2010).

Untuk meminimalisir risiko bencana, ketika dan pasca bencana. Fase pra-bencana menjadi fase penting. Dalam fase pra-bencana memiliki beberapa tahapan yang dilakukan yaitu ketika tidak terjadi bencana seperti, perencanaan penanggulangan bencana, membuat rancangan pembangunan, menganalisa risiko bencana, pelatihan dan lain sebagainya. Selanjutnya ketika situasi memiliki potensi risiko bencana seperti kesiapsiagaan, mitigasi dan peringatan dini.

## METODOLOGI

Pada penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan penyajian analisa secara deskriptif. Bagdan dan Taylor (1975:5) dalam Moleong (2013:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini difokuskan pada manajemen komunikasi pada situasi terdapat potensi bencana banjir yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya. Lokasi penelitian dalam kajian ini dilakukan di Daerah Kabupaten Nagan Raya, khususnya di Kecamatan Tripa Makmur.

Sumber data dalam penelitian ini ialah subjek darimana data diperoleh (Arikunto, 2010:107). Menurut Sugiyono (2012:62) sumber data penelitian yang bersifat kualitatif dalam penelitian ini adalah sebagai Sumber data primer yang diperoleh langsung dari informan di lapangan yakni melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dan observasi partisipasi. Sumber data sekunder diperoleh dari studi literatur atau penelitian-penelitian terdahulu, dokumen-dokumen grafi, seperti tabel, catatan, foto serta dari sumber bacaan lainnya yang memiliki keterkaitan serta relevan terhadap tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat risiko diperoleh dari penggabungan tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas untuk seluruh jenis bencana di Kabupaten Nagan Raya. Adapun rekapitulasi tingkat risiko bencana untuk setiap jenis bencana di

Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.3.**

### Tingkat Risiko di Kabupaten Nagan Raya

No	Jenis Bencana	Tingkat Risiko	Penduduk Terpapar (Jiwa)	Lahan Terpapar (Ha)	Kerugian (Juta Rupiah)
1	Banjir	Tinggi	130,038	50.414	30.851.310
2	Banjir Bandang	Tinggi	12,703	160.227	89.936
3	Cuaca Ekstrim	Tinggi	154,932	-	4.533.305
4	Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	Sedang	236	9.067	19.850
5	Gempabumi	Tinggi	158,223	-	5.255.618
6	Kebakaran Hutan Dan Lahan	Tinggi	-	193.413	2.390.449
7	Kekeringan	Tinggi	158,223	184.346	2.065.318
8	Tanah Longsor	Tinggi	3,048	184.044	445.382
9	Tsunami	Tinggi	10,854	-	11.119.934

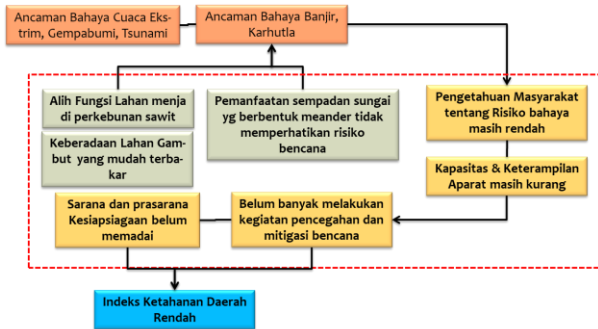
*Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Nagan Raya, 2018*

**Tabel 4.4.**

### Potensi Bahaya Banjir Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Bahaya (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Luas Total	Kelas
1	Beutong	43,13	2.433,64	1.043,13	3.519,90	Tinggi
2	Beutong Ateuh Banggalang	3,69	137,06	319,52	460,27	Tinggi
3	Darul Makmur	1.254,01	35.701,40	22.454,49	59.409,89	Tinggi
4	Kuala	200,26	6.799,81	3.350,40	10.350,47	Tinggi
5	Kuala Pesisir	-	4.193,20	2.370,61	6.563,81	Tinggi
6	Seunagan	45,25	3.578,63	2.112,92	5.736,80	Tinggi
7	Seunagan Timur	187,03	2.544,59	806,17	3.537,78	Tinggi
8	Suka Makmue	36,81	2.015,73	1.258,87	3.311,41	Tinggi
9	Tadu Raya	419,54	10.249,88	7.554,54	18.223,97	Tinggi
10	Tripa Makmur	1.198,30	13.292,49	3.570,89	18.061,68	Tinggi
<b>Kabupaten Nagan Raya</b>		<b>3.388,01</b>	<b>80.946,42</b>	<b>44.841,54</b>	<b>129.175,97</b>	<b>Tinggi</b>

*Sumber : Dokumen KRB Kabupaten Nagan Raya tahun 2019-2023*



Gambar 4.2. Akar Masalah Kebencanaan di Kabupaten Nagarakabupaten

Sumber: RPB Kabupaten Nagarakabupaten 2021-2025

## Manajemen Komunikasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nagarakabupaten Pada Fase Pra-Bencana Banjir

### 1. Pada Situasi Terdapat Potensi Bencana

Tahap perencanaan dalam situasi ini diawali dengan kesiapsiagaan, dimana kesiapsiagaan mengenai kebutuhan sumber daya baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana hingga logistik. Sejalan dengan ungkapan dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nagarakabupaten, Mistar, ST:

“Hal pertama yang dipersiapkan jelas SOP nya, personilnya nya, tenaga nya peralatannya, atributnya, logistiknya dan hal-hal lainnya yang menyangkut dengan bencana banjir”.

Tahap selanjutnya ialah tahap mitigasi bencana, dimana pada tahap ini dilakukan sosialisasi, pelatihan bagi personil untuk penanggulangan bencana dan pembangunan infrastruktur, dalam hal ini mitigasi bencana yang dilakukan pihak BPBD Kabupaten Nagarakabupaten melakukan sosialisasi dan melakukan pelatihan bagi

personil untuk penanggulangan bencana seperti yang dikatakan oleh Agustiar, SP:

“Biasanya sebelum terjadi bencana itu kita, kalau memang khusus untuk banjir pertama kita melakukan pelatihan-pelatihan setiap tahun ada, pelatihan operator boat itu ada walaupun di ulang-ulang supaya jangan ini anggota kita kan, disitu kita latih para operator yang membawa boat karena kan kita mainnya air. Nanti disitu pertama ada operator boat yang bawa istilahnya sopir boat terus ada anggota kita yang menyelamatkan warga, dan sebelum itu kita tetap apa sediakan tenda, tenda pengungsian kalo memang masyarakat membutuhkan pengungsian kita sudah siap dengan tenda pengungsian itu dipersiapkan kalau memang sudah terjadi, itu sudah kedaruratan ini kan kita bencana sejak pra bencana kan, terus alat-alat pelampung atau apa saja itu yang menyangkut dengan banjir yang kami persiapkan”.



Gambar 1. Para Peserta Pelatihan Tahun 2019

Sumber : BPBD Nagarakabupaten

Mitigasi bencana tidak dilakukan secara optimal oleh aparat BPBD dikarenakan masih belum adanya upaya sosialisasi secara langsung kepada

masyarakat terdampak bencana untuk kesadaran terhadap risiko bencana.

Sulitnya mengajak masyarakat untuk di evakuasi ketika terjadi banjir di Kabupaten Nagan Raya, khususnya di Kecamatan Tripa Makmur merupakan salah satu bentuk kurangnya sikap sadar risiko bencana pada masyarakat. Pendapat masyarakat yang lebih nyaman tinggal dirumah sendiri karena tempat pengungsian yang dibangun di badan jembatan. Tidak adanya tempat pengungsian yang khusus dibangun untuk evakuasi seperti yang dikatakan oleh pihak BPBD. Disamping itu belum adanya pembangunan infrastruktur yang mendukung pengurangan risiko bencana. Maka aparat Kecamatan Tripa Makmur memiliki inisiatif untuk membuat saluran pembuangan air hingga ke laut. Terhambatnya pembangunan infrastruktur dikarenakan terbatasnya anggaran dana.

Tahap selanjutnya yaitu peringatan dini, dimana tahapan ini berfungsi pemberian informasi awal jika akan terjadinya bencana. Dalam hal ini pihak BPBD tidak memberikan peringatan dini kepada masyarakat sebagai upaya antisipasi bencana banjir. Dapat ditarik kesimpulan ketika proses perencanaan situasi terdapat potensi bencana belum optimal dilakukan oleh pihak BPBD dan masih belum sesuai mengikuti panduan RPB.

### **1. Pengorganisasian**

Dalam tahapan ini pihak BPBD tidak lagi membuat pengorganisasian sebab ketika terjadi bencana semua divisi menyatu untuk menanggulangi bencana. Seperti pernyataan dari Mistar, ST:

“Jadi kaita disini yang jelas kalau sudah namanya bencana tidak melihat lagi dibagian divisi lagi, kita sama-sama turun kelapangan. Setelah kejadian nanti baru kita atur perbagian artinya setelah bencana

itu apa yang harus ditangani itu di bidang recovery nya kalo masih terjadi bencana itu lebih ke bidang logistiknya”.

Pada tahap pengorganisasian ketika terdapat potensi bencana BPBD melibatkan seluruh anggota untuk turun ke lokasi kejadian tanpa melihat tugas pokok dan fungsi anggota dari masing-masing divisi. Ketika terdapat potensi bencana pihak BPBD melakukan pengendalian dengan struktural formal, melakukan pemanduan tiga kabid yang dilakukan secara langsung. Sebelumnya pihak BPBD menerima informasi potensi banjir yang disampaikan oleh relawan perkecamatan melalui media *Whatsapp Group*. Setelahnya ditentukan anggota mana saja yang akan diturunkan kelapangan dan selanjutnya bersatu dilapangan. Pihak BPBD tidak melakukan koordinasi dengan stakeholder eksternal. Stakeholder yang bekerjasama dengan BPBD langsung menuju lokasi kejadian tanpa harus adanya koordinasi.

### **2. Pengendalian**

Pada tahapan ini pengendalian dan kepemimpinan motivasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Nagan Raya yaitu dengan memberikan arahan ketika akan turun kelapangan untuk menanggulangi bencana, Moursal, ST mengatakan:

“..sebelum kita turun kelapangan, selalu kita briving kalo ada bencana kita harus selalu siap”.

Selanjutnya hal yang dilakukan pihak BPBD dalam memberikan support ketika menerima keluhan, Moursal, ST mengatakan:

“kalo dibilang capek ya capek karena bencana inikan tidak tiap hari, kalo dua bulan ga ada bencana kan mereka kan bisa santai-santai aja makanya orang itu tidak ngeluh. Motivasinya ya setiap pekerjaan kita beri arahan dan ucapan

terimakasih. Pekerjaan kita kan pekerjaan kemanusiaan menolong orang itu saja kita tanamkan ke anggota dan kita bersama-sama ke masyarakat”

Kepemimpinan krisis yang dilakukan ketika terdapat potensi bencana banjir yang dilakukan BPBD, Moursal, ST menyatakan: “Biasanya kan kita satu pemandu, pertama kan kita koordinasi kabid 3 kabid berkoordinasi kita memberi arahan siapa siapa saja anggota yang berangkat, disana gitu juga mendengar arahan juga ga mungkin main sendiri-sendiri, jalan pun bareng disana, kita bawa boat, mobil logistik bawa sama-sama kita kesana”.

Pada tahap pengorganisasian ketika terdapat potensi bencana BPBD melibatkan seluruh anggota untuk turun ke lokasi kejadian tanpa melihat tugas pokok dan fungsi anggota dari masing-masing divisi. Ketika terdapat potensi bencana pihak BPBD melakukan pengendalian dengan struktural formal, melakukan pemanduan tiga kabid yang dilakukan secara langsung. Sebelumnya pihak BPBD menerima informasi potensi banjir yang disampaikan oleh relawan perkecamatan melalui media *Whatsapp Group*. Setelahnya ditentukan anggota mana saja yang akan diturunkan kelapangan dan selanjutnya bersatu dilapangan. Pihak BPBD tidak melakukan koordinasi dengan stakeholder eksternal. Stakeholder yang bekerjasama dengan BPBD langsung menuju lokasi kejadian tanpa harus adanya koordinasi.

### **3. Evaluasi**

Pada tahap ini evaluasi dan koordinasi yang dilakukan oleh pihak BPBD Kabupaten Nagan Raya, ketika terdapat potensi bencana banjir. Khususnya yang

berada didaerah Tripa Makmur koordinasi yang dilakukan antar pihak yaitu relawan yang berada dikecamatan menginformasikan kepada pihak BPBD dan juga Muspika lalu pihak BPBD membuat rapat perencanaan untuk penanggulangan bencana, sesuai dengan pernyataan Mistar, ST:

“Waktu koordinasi kan jelas waktu bencana itu kita tau dan kita bentuk tim relawan perkecamatan, misalnya kecamatan darul makmur ada kebakaran itu nanti orang itu udah sampe kesana standby udah tau, informasinya kita kan udah tau di share lewat grup karulah yang ada TNI, POLRI sudah terpantau disitu jadi tanpa kita berkoordinasi semuanya langsung ketitik bencana “.

Evaluasi dan koordinasi pada situasi ini dengan melakukan panduan tiga kabid setelah mendapatkan informasi dari relawan. Setelahnya ditentukan anggota mana saja yang akan diturunkan kelapangan dan selanjutnya bersatu dilapangan. Tidak adanya koordinasi dengan stakeholder sebab secara otomatis langsung berada di lokasi yang terpapar bencana.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, dapat di tarik kesimpulan akar masalah terjadinya banjir di Kecamatan Tripa Makmur disebabkan oleh intensitas curah hujan tinggi, topografi rendah, alih fungsi lahan, banjir kiriman, sarana mitigasi belum memadai dan rendahnya sikap sadar bencana.

Pada situasi terdapat potensi bencana banjir di Kecamatan Tripa Makmur. manajemen komunikasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Nagan Raya belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor: 1). Pada tahap mitigasi bencana banjir, belum adanya sosialisasi

secara langsung kepada masyarakat dikarenakan keterbatasan waktu dan juga anggaran. Hal ini berpengaruh pada rendahnya sikap sadar bencana pada masyarakat dan enggan di evakuasi ketika terjadi bencana banjir. 2) Masih minimnya sarana dan prasarana mitigasi bencana yang dimiliki BPBD dalam menunjang pengurangan risiko bencana yang disebabkan oleh terbatasnya anggaran. 3) Belum adanya sistem peringatan dini ketika terdapat potensi bencana banjir yang diberikan pihak BPBD kepada masyarakat khususnya Kecamatan Tripa Makmur. 4). BPBD Kabupaten Nagari Raya belum memiliki akun media sosial dan juga *website* resmi, hal ini dapat digunakan sebagai sarana informasi serta edukasi kepada masyarakat.

## REFERENSI

- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Cangara, Hafied. 2014. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Junaedi, Fajar. 2011. *Manajemen Penyiaran Berita Bencana, bagian dari buku Komunikasi Bencana*. Ed. Setio Budi HH. Yogyakarta: Litera kerjasama dengan ASPIKOM dan Perhumas.
- Mulyana, Deddy. 2009. *Ilmu Komunikasi Sebagai Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lestari, Puji. 2011. *Manajemen Komunikasi Bencana dan Peluang Riset Komunikasi Bencana di Indonesia dalam Komunikasi Bencana*. Ed. Setio Budi HH. Yogyakarta: Litera
- Moleong, J. Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Moleong, J. Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya
- Nurjanah. R.Sugiharto, Dede Kuswanda, dkk. 2013. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Ramli, Soehatman. 2010. *Pedoman Praktis Manajemen Bencana*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Riswandi. 2009. *Ilmu komunikasi*. Jakarta: Graha Ilmu
- Soehartono. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan, Kualitatif, kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprpto, Tommy. 2009. *Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta : MedPress.
- Suprpto, Tommy. 2011. *Pengantar Ilmu Komunikasi Dan Peran Manajemen Dalam Komunikasi*. Yogyakarta: CAPS

## Jurnal:

- Andy Corry Wardhani. 2014. *Urgensi Komunikasi Bencana Dalam Mempersiapkan Warga Di Daerah Rawan Bencana*. Di akses dari <http://digilib.unila.ac.id/1993/>
- Donna Asteria. 2016. *Optimalisasi Komunikasi Bencana Di Media Massa Sebagai Pendukung Manajemen Bencana*. Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, Jurnal Komunikasi 01 (2016) 1-11. Di akses dari. [21](http://www.jurnal-</a></p>
</div>
<div data-bbox=)



iski.or.id/index.php/jkiski/article/view/30/19

Puji Lestari, Agung Prabowo, Arif Wibawa. 2012. *Manajemen Komunikasi Bencana Merapi 2010 pada saat Tanggap Darurat*. Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 10 No. 02. Di akses dari <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/125>

Saputra, Yasir. *Manajemen Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Terhadap Bencana Banjir Di Kabupaten Kampar*. Vol.5:Edisi 1 Januari 2018. Di akses dari [https://jom.unri.ac.id/index.php/JO\\_MFSIP/article/view/19226](https://jom.unri.ac.id/index.php/JO_MFSIP/article/view/19226)

**Skripsi (online):**

Lorencia P. Barus. 2013. *Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Medan*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sumatera Utara. Sumatera Utara. Di akses dari [https://www.academia.edu/34761652/Peranan\\_Badan\\_Penanggulangan\\_Bencana\\_Daerah\\_Bpbd\\_Dalam\\_Penanggulangan\\_Bencana\\_Banjir\\_Di\\_Kota\\_Medan\\_Skripsi](https://www.academia.edu/34761652/Peranan_Badan_Penanggulangan_Bencana_Daerah_Bpbd_Dalam_Penanggulangan_Bencana_Banjir_Di_Kota_Medan_Skripsi)

**Skripsi:**

Agus Junaidi. 2014. *Efektifitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Dalam Mensosialisasikan Kesiapsiagaan Rawan Bencana*.

**Tesis (online):**

Sariyanti, Lilis. 2018. *Kerentanan Masyarakat dan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Banjir di*

*Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya*. Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sumatera Utara. Sumatera Utara. Di akses dari <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/8059/157047007.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

**Internet:**

Marzuki, Basri. 2019. *BNPB: 3.155 Bencana hingga November, 459 Tewas*. 2019. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191107101531-20-446280/bnpb-3155-bencana-hingga-november-459-tewas>. Diakses pada tanggal 21 januari 2020, pukul 22:00 WIB

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia*. 2008. [https://www.bnpb.go.id/ppid/file/P\\_P\\_No.\\_21\\_Th\\_2008.pdf](https://www.bnpb.go.id/ppid/file/P_P_No._21_Th_2008.pdf)